



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 77**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG
NILAI SEWA REKLAME**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2017**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG
NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Daerah dari jenis Pajak Reklame berdasarkan perubahan nilai sewa reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011

tentang Nilai Sewa Reklame, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan ke
Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
DaerahTingkatII Pekalongan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Pekalongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2016 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa
Reklame (Berita Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
29 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai
Sewa Reklame (Berita Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2014
Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Lampiran III Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 29), diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

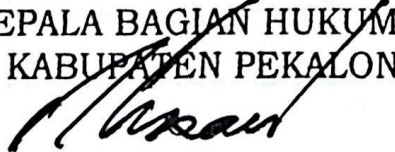
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670914 199703 1 005